



DINASTENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



RENCANA STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis dalam urusan bidang Ketenagakerjaan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029, Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, serta memperhatikan berbagai potensi dan sumberdaya yang tersedia serta semakin kuatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Renstra ini telah diupayakan disusun secara optimal, namun kami menyadari masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan prioritas serta kebijakan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029.

Teluk Kuantan, 30 September 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



JOHN PITTE ALSI, S.IP., M.M
Pemuda Utama Muda
NIP. 19801012 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA.....	10
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja	10
2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja.....	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.....	23
2.2.2 Isu Strategis	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
3.2 Strategi Dinas Tenaga Kerja.....	35
3.3 Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1 Uraian Program	41
4.2 Uraian Kegiatan	47
4.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi	57
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	68
4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	71
BAB V PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai ASN Dan Non ASN Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Kelengkapan Aset Dinas Tenaga Kerja	17
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Utama Renstra Sebelumnya	21
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan Dinas Tenaga Kerja	29
Tabel 2.5	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah	30
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	34
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	38
Tabel 3.4	Penahapan Renstra PD Dinas Tenaga Kerja	39
Tabel 3.5	Teknik MerumuskanArah Kebijakan Renstra PD Dinas Tenaga Kerja	40
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD	17
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	48
Tabel 4.4	Sub Kegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	69
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra yang Berpijak pada RPJMD	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Setelah melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tersusunlah dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029. Hakekat pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar suatu perubahan sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable) dan berkelanjutan (sustainable). Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Tenaga Kerja berisi tentang strategi pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan rincian tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Komponen penting dalam pembangunann merupakan supply bagi pembangunan khususnya pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah penduduk usia kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja didalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, kualitas pencari kerja yang rendah, produktivitas yang rendah, penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang rendah, kurang optimalnya hubungan industrial ketenagakerjaan dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), tetapi juga bagi mereka yang telah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan yang lebih baik. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (employment growth friendly) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulan masalah pengangguran dan kemiskinan dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif. Karenanya pengurangan pengangguran dan penanggulan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja merupakan syarat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan sangat mempengaruhi kondisi pembangunan bidang ketenagakerjaan. Secara garis besar pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Kondisi Penduduk Usia Kerja. Penduduk Usia Kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang secara teori mampu bekerja dan berkontribusi dalam perekonomian.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (seperti sedang menunggu panen atau cuti).
3. Jumlah Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, serta pengangguran.
4. Penduduk yang Bekerja. Penduduk yang Bekerja adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah atau gaji yang dilakukan paling sedikit satu

jam dalam seminggu terakhir.

5. Pengangguran. Penganggur adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan dan atau sedang mempersiapkan usaha baru dan atau sudah punya pekerjaan atau usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 16 ayat 2 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berikut gambaran langkah-langkah atau tahapan-tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra yang Berpijak
pada RPJMD



Selain tahapan diatas, proses penyusunan Renstra juga telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah harus menerapkan empat pendekatan utama yaitu :

1. Pendekatan Teknokratik, disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah;
2. Pendekatan Partisipatif, dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukan stakeholder dan pihak terkait lainnya;
3. Pendekatan Politis, penyusunan Renstra memperhatikan visi misi dan janji politik yang pernah disampaikan ke publik, dan
4. Pendekatan Atas Bawah (top down) dan Bawah Atas (bottom-up).

Pendekatan keempat yaitu “Pendekatan Top Down dan Bottom Up”, dalam penyusunan Renstra memperhatikan bottom up berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan Top Down, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen perencanaan diatasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Riau dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 - 2029 berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 136);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review Rencana PeAtas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025
- RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KAB, KUANTAN SINGINGI 2025-2029

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045
23. Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029 adalah :

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029;
- b) Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029;
- c) Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029; dan
- d) Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029.
- e) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja melalui perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala;
- f) Mendorong transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan Tenaga Kerja

kondusif dan lapangan pekerjaan makin banyak menyerap tenaga kerja .

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan yang mendukung iklim investasi kondusif, struktur organisasi, sumber daya Aparatur, sarana dan prasarana pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengidentifikasi berbagai permasalahan nyata dan isu strategis yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi pencapaian kinerja dan pelayanan publik.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merumuskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dalam lima tahun ke depan, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis dan arah pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, mempunyai susunan organisasi dan tugas pokok sebagai berikut;

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris, membawahi;
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
- c) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menyelenggarakan fungsi :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Bidang Tenaga Kerja.

- ✓ Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
- ✓ Penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- ✓ Pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian umum mempunyai tugas:

- ✓ Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- ✓ Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- ✓ Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- ✓ Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian;
- ✓ Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- ✓ Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- ✓ Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- ✓ Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- ✓ Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- ✓ Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- ✓ Melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tangan barang milik Negara;
- ✓ Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4) Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- ✓ Merencanakan Program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- ✓ Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan;
- ✓ Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Subbagian Program dan Keuangan;
- ✓ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Program dan Keuangan;
- ✓ Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program, anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja;
- ✓ Mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data bidang Dinas Tenaga Kerja;
- ✓ Melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan
- ✓ Mengelola keuangan dan menyiapkan gaji pegawai;
- ✓ Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran
- ✓ Melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- ✓ Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
- ✓ Mengkoordinasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- ✓ Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan tugas dan kegiatan pada Substansi Program; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- ✓ Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- ✓ Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

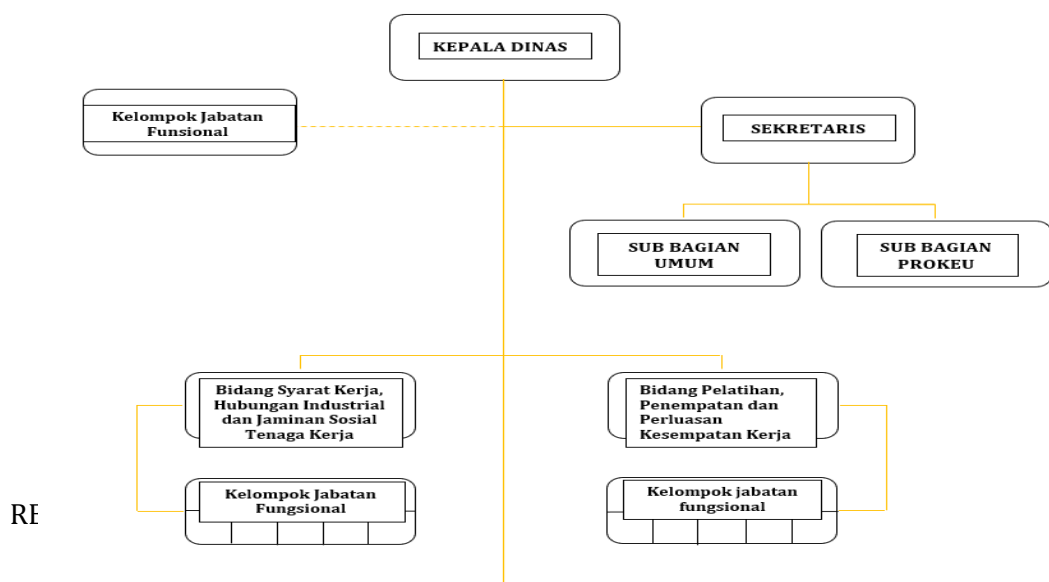
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- ✓ Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- ✓ Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Masing-masing jabatan fungsional adalah melaksanakan tugas yang melekat pada jabatan fungsional sesuai kerja dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Sehingga Tahun 2022 dilakukan terbit Peraturan Bupati Kuantan singingi nomor 10 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut;

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja



2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tenaga kerja didukung oleh sumber daya personil (SDM) maupun sarana dan prasarana yang relatif memadai.

Pemerintahan yang efektif dan demokratis dapat digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis.

Susunan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi pada 31 Desember 2024 berjumlah 39 orang, laki-laki 23 orang (58,97%) dan perempuan 16 orang (41,03%). Berdasarkan struktur organisasi Perangkat Daerah, dari jumlah pegawai ini di atas terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, Eselon III sebanyak 3 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV sebanyak 2 orang, pejabat fungsional 6 orang, pelaksana 4 orang, dan Staff (Non ASN) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN Dan Non ASN Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Eselon II	1	0	1	2,56 %
2	Eselon III	2	1	3	7,69 %
3	Eselon IV	0	2	2	5,13 %

4	Jabatan Fungsional	5	1	6	15,39 %
5	Pelaksana	3	1	4	10,26 %
6	Staff	12	11	23	58,97 %
		23	16	39	100 %

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, memiliki 1 (satu) gedung. Di setiap ruangan dilengkapi dengan prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scaner, jaringan WiFi serta beberapa alat kendaraan penunjang Kegiatan. Berikut ini diuraikan Daftar Jumlah Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Riau hingga tahun Desember 2024 tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kelengkapan Aset Dinas Tenaga Kerja

NAMA BARANG	MERK	HARGA
ALAT ANGKUTAN		378.974.810,00
MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	TOYOTA RUSH 1.5CJ2J	130.000.000,00
MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	TOYOTA/INNOVA-G	248.974.810,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		156.410.087,23
MEJA KERJA KAYU	FODO CT 90	606.148,26
MEJA KERJA KAYU	FODO CT 90	606.148,26
MEJA KERJA KAYU	FODO CT 90	606.148,26
MEJA KERJA KAYU	FODO CT 90	606.148,26
KURSI BIASA	TOP 312	505.123,55
KURSI BIASA	TOP 312	505.123,55
KURSI BIASA	TOP 312	505.123,55
KURSI BIASA	TOP 312	505.123,55
MEJA KERJA KAYU		11.990.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00

KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
KURSI BESI	FUTURA	685.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
MEJA 1/2 BIRO	ORBITREND	1.475.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	DONATI	6.150.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	DAVIS 5931	3.400.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	DAVIS 5931	3.400.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	LEVANTE	2.000.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	LEVANTE	2.000.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	LEVANTE	2.000.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	LEVANTE	2.000.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	LEVANTE	2.000.000,00
GORDYIN/KRAY	TEMPAHAN	29.400.000,00
A.C. SPLIT	SHARP	5.460.000,00
A.C. SPLIT	PANASONIC	5.980.000,00
A.C. SPLIT	PANASONIC	5.980.000,00
A.C. SPLIT	PANASONIC	5.980.000,00
SOFA	SOFA TAMU	13.500.000,00

LEMARI KAYU	LOKAL	9.950.000,00
FILING CABINET BESI	MUSTANG	5.250.000,00
FILING CABINET BESI	MUSTANG	5.250.000,00
FILING CABINET BESI	MUSTANG	5.250.000,00
KOMPUTER		188.877.669,39
P.C UNIT	LENOVO 14 inc	15.655.041,59
PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	CANON PIXMA MP 287	2.020.494,20
PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	CANON PIXMA MP 287	2.020.494,20
P.C UNIT	HP ENVY	23.405.944,70
P.C UNIT	HP ENVY	23.405.944,70
P.C UNIT	ASUS	11.746.875,00
P.C UNIT	ASUS	11.746.875,00
P.C UNIT	LENOVO INTEL CORE 5	16.583.400,00
P.C UNIT	LENOVO INTEL CORE 5	16.583.400,00
P.C UNIT	LENOVO INTEL CORE 5	16.583.400,00
LAP TOP	ASUS	16.250.400,00
LAP TOP	ASUS	16.250.400,00
PRINTER	EPSON L3210	3.170.348,84
PRINTER	EPSON L3210	3.170.348,84
PRINTER	EPSON L3210	3.170.348,84
PRINTER	EPSON L121	2.371.317,83
PRINTER	EPSON L121	2.371.317,83
PRINTER	EPSON L121	2.371.317,83

Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi melakukan validasi barang yang tergolong sudah tidak layak guna/pakai terhadap barang yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis meskipun diperbaiki. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat kondisi-kondisi seperti modernisasi, barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kadaluarsa, barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus dan sebagainya, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran berupa input, output, dan outcome.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator Kesempatan Kerja Tahun 2024 adalah 97,58%, dengan capaian kinerja sebesar 103,37%. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi. Artinya, 97 orang dari 100 angkatan kerja terserap ke dalam lapangan pekerjaan dan sisanya adalah menganggur. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi yang tumbuh setelah Pandemi.
2. Capaian Indikator Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun mencapai 5,56%, dimana Jumlah sengketa pengusaha Pekerja pada tahun 2024 sebanyak 10 sengketa dan Jumlah Perusahaan yang Terdaftar melalui Mekanisme Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada Tahun 2024 sebanyak 180 perusahaan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah realisasi dari target menunjukkan tingginya capaian kinerja. Pada tahun 2023 realisasi kinerjanya adalah sebesar 2,10% dari target sebesar 11,90% pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 5,56% dari target sebesar 10,7%. Berdasarkan tabel diatas adanya penurunan target dari tahun sebelumnya diikuti oleh realisasi yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 192,60%. Hal ini disebabkan karena kecilnya persentase angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun yang disebabkan karena sudah tingginya tingkat kesadaran Perusahaan yang menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan diperusahaan. Masing-masing pekerja dan Perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga kemungkinan untuk timbulnya perselisihan menjadi kecil.

Berikut ini Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2024.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Utama Renstra Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4.09-5.13	4.87	4.61	4.45	4.29	3.05	2.49	2.48	74,57	51.13	53.80
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	64,69	64,86	65,03	65,20	65,37	71.35	71.5	65.5	110,29	110,24	99,95
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	94	94.36	94.4	94.5	94.7	97.34	97.5	97.6	103.55	103.33	103.37
		Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	14.29	11.9	10.7	8.3	5.95	1.36	2.1	5.56	1050.74	566.67	192.45

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Layanan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Tenaga Kerja berperan dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan publik ketenagakerjaan yaitu:

1. Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1/)

Layanan ini membantu pencari kerja untuk mendapatkan kartu pencari kerja yang diperlukan untuk melamar pekerjaan

2. Pendaftaran Bursa Kerja Khusus (BKK)

Layanan ini memfasilitasi pendaftaran BKK yang didirikan di sekolah atau lembaga pelatihan.

3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dinas Tenaga Kerja menyediakan wadah untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, termasuk perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja

4. Pelatihan Kerja

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

5. Sertifikasi Kompetensi

Layanan sertifikasi profesi untuk memastikan tenaga kerja memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

6. Magang

Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi program pemagangan di perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta.

7. Peningkatan Produktivitas

Dinas Tenaga Kerja memiliki program untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.

8. Penempatan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja

9. Perluasan Kesempatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan

memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

10. Tenaga Kerja Asing

Dinas Tenaga Kerja memberikan layanan terkait penggunaan tenaga kerja asing dan rekomendasi.

11. Informasi Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja menyediakan berbagai informasi terkait ketenagakerjaan, termasuk lowongan kerja, pelatihan, dan peraturan perundang-undangan.

12. Informasi untuk Penyandang Disabilitas

Dinas Tenaga Kerja memiliki layanan informasi khusus untuk penyandang disabilitas yang ingin mencari pekerjaan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan/Tantangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan ketenagakerjaan berusaha. Upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai, mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas – luasnya dan merata dalam sektor –sektor pembangunan.

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, relatif rendahnya kualitas tenaga kerja dan adanya ketimpangan antara kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dengan yang tersedia, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tidak sebanding dengan jumlah Pencari kerja terdaftar, dan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan

dari angkatan kerja yang tidak bekerja/pengangguran juga hanya sebagian kecil.

Dengan berkembangnya industrialisasi dan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi serta meningkatnya jumlah tenaga kerja, sehingga masalah hubungan industrial, kesejahteraan serta perlindungan terhadap tenaga kerja masih mewarnai masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kerawanan hubungan industrial dapat disebabkan dari berbagai faktor tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha dan pekerja saja, akan tetapi juga bersumber dari peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dinilai masih lemah sehingga sulit menghadapi situasi dan kondisi ketenagakerjaan sekarang, upaya memperkuat lembaga ketenagakerjaan guna penyelesaian hubungan industrial, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja.

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2025-2029, maka dari itu perlu dilakukan analisa SWOT untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan ketenagakerjaan berusaha. Upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai, mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor pembangunan. Dengan berkembangnya industrialisasi dan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi serta meningkatnya jumlah tenaga kerja, sehingga masalah hubungan industrial, kesejahteraan serta perlindungan terhadap tenaga kerja masih mewarnai masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat pada rendahnya pendapatan dan menyebabkan pekerja jatuh kepada garis kemiskinan. Dimana kemiskinan tersebut berawal dari :

1. Tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
2. Tidak mempunyai penghasilan yang layak

3. Tidak mempunyai pekerjaan
4. Tidak mempunyai keterampilan dan keahlian

Upaya yang dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan tersebut melalui pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat bagi pencari kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja, mendorong dan memfasilitasi angkatan kerja agar menjadi wirausahawan yang tangguh, serta terfasilitasinya penempatan tenaga kerja lokal diperusahaan swasta.

Kerawanan hubungan industrial dapat disebabkan dari berbagai faktor tidak hanya bersal dari kalangan pengusaha dan pekerja saja, akan tetapi juga bersumber dari peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dinilai masih lemah sehingga sulit menghadapi situasi dan kondisi ketenagakerjaan sekarang, upaya memperkuat lembaga ketenagakerjaan guna penyelesaian hubungan industrial, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

1. Tingginya angka pengangguran
2. Rendahnya keterampilan tenaga kerja
3. Kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan
4. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja
5. Rendahnya kemampuan penempatan tenaga kerja yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja yang tersedia
6. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dan masih perlu dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Dampak perubahan lingkungan strategis dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, maka dari itu perlu dilakukan analisa SWOT untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Analisa SWOT

Analisa SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Treats*) adalah proses

assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terukur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yakni berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi organisasi yang realistis dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisa SWOT juga diperlukan mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 2 (dua) tahun kedepan serta membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana suatu organisasi yang memiliki kekuatan akan terdapat peluang yang besar.

B. Analisa Kondisi Internal

Analisa kondisi internal merupakan suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*).

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Adanya kewenangan pemerintah daerah di dibidang tenaga kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Adanya kebijakan tentang kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Kelembagaan setingkat Eselon II a;
- d. Adanya mediator dalam melakukan mediasi perselisihan buruh/karyawan perusahaan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan bidang tenaga kerja;
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan tenaga kerja;

- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi teknis bidang tenaga kerja;
- d. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Kuantan Singingi;
- e. Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan;
- f. Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional mediator dan pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum optimal;
- g. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal;
- h. Tidak adanya kewenangan pengawasan tenaga kerja;
- i. Belum adanya regulasi tentang CSR dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

C. Analisa Kondisi Eksternal

Analisa kondisi eksternal merupakan evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang berdampak terhadap munculnya suatu peluang baru ataupun bisa menjadi ancaman terhadap organisasi yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang (*Oppurtinities*) dan ancaman (*Threat*).

1. Peluang (*Oppurtinities*)

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Tersedianya program nasional dan provinsi terhadap pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensidan tenaga kerja mandiri.

2. Ancaman (*Treaths*)

- a. Kompetensi pencari kerja yang tersedia masih rendah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/lowongan kerja, sehingga tidak semua lowongan pekerjaan dapat diisi oleh pencari kerja;
- b. Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia;
- c. Sebagian masyarakat belum mengenal UPT LK/BLK sehingga tidak mendapat informasi program pelatihan yg dilaksanakan UPT LK/BLK secara memadai;
- a. Masih adanya hubungan yang kurang harmonisnya hubungan industrial di perusahaan (antara pengusaha dan pekerja);

- b. Masih adanya Perusahaan yang belum menerapkan aturan norma ketenagakerjaan.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan dapat diidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain :

1. Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan berbasis kompetensi;
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja;
3. Meningkatkan penyelesaian jumlah kasus hubungan industrial.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Dari permasalahan diatas mengerucut pada satu masalah pokok yaitu “Rendahnya Penyerapan Angkatan Kerja” dan ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja.
2. Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan terkait tata kelola kerja yang layak.
3. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja.
4. Masih rendahnya informasi pasar kerja.

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Dinas Tenaga Kerja

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya penyerapan angkatan kerja	Rendahnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	○ Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan masih relatif kecil. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja ○ Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh akan pentingnya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ○ Kurangnya animo pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dalam memahami peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan ○ Terbatasnya sumber daya manusia ketenagakerjaan (mediator, pengantar kerja dll) ○ Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan kompetensi tenaga kerja ○ Manajemen ketenagakerjaan daerah belum optimal ○ Manajemen ketenagakerjaan daerah belum optimal ○ Kurangnya sinergitas multi stakeholders ○ Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dibidang ketenagakerjaan ○ Masih rendahnya pembinaan dan perlindungan terhadap PMI ○ Masih rendahnya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ○ belum optimalnya sistem pengelolaan data base tenaga kerja daerah

Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peranan angkatan kerja di Kabupaten Kuantan Singingi menurut lapangan usaha menunjukkan proporsi terbesar pada sektor pertanian dan industri pengolahan.	Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja	Rendahnya akses terhadap sumber air bersih dan sanitasi permukiman layak;	Perdamaian dan Keamanan: Menyelesaikan Konflik dan Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja
Keberadaan perusahaan sektor industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja.	Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan	Meningkatnya pencemaran air sungai akibat PETI	Pembiayaan untuk Pembanguna: Berinvestasi dalam Masa Depan yang Berkelanjutan	Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan terkait tata kelola kerja yang layak
	Minimnya pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan.	Rendahnya distribusi pangan dengan harga terjangkau	Aksi Iklim: Jalan Menuju COP 30 dan Negosiasi IMO	Industri mampu bertahan di zona ekspansi	Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas	Masih rendahnya informasi pasar kerja
	Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur air limbah, limbah B3 dan pengelolaan sampah	Kesetaraan Gender: Merefleksikan Kemajuan di Tengah Kemunduran	Investasi pemerintah dan swasta meningkat	Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum semua perusahaan mempekerjakan tenaga disabilitas	Pengelolaan konservasi sumber daya air tanah, air permukaan dan kawasan konservasi serta rehabilitasi lahan kritis belum optimal.		Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Pusat Kebudayaan Melayu	
	Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan terkait tata kelola kerja yang layak			Penyaluran kredit tumbuh positif	Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Terbatasnya jumlah pencari kerja yang dapat difasilitasi mengikuti pelatihan					
	Tidak adanya job fair tingkat Kabupaten					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum maksimalnya pelaksanaan mandatory UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI sebelum bekerja					
	Ketidakpatuhan pemberi kerja maupun pekerja/buruh terhadap aturan ketenagakerjaan					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Adapun tujuan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan sasaran sebagaimana yang termuat dalam RPJMD “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dan “Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja”, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 maka tujuan renstra Dinas Tenaga Kerja adalah “Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja”. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 berfokus pada:

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja
2. Meningkatkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Base Line 2024	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	T.1 Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja		T1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,12	68,45	70,12	71,98	73,22	75,14	
			T1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,28	2,22	2,15	2,09	2,02	1,96	
			T1.3 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	%	25,24	30,32	35,41	40,49	45,57	50,65	
		S.1 Meningkatnya Kesempatan Kerja	S1.1 : Persentase Tenaga Kerja Terampil dan Kompeten	%	2,14	2,83	3,47	3,98	4,41	4,99	
			S1.2 : Persentase Serapan Tenaga Kerja	%	87,83	88,11	88,73	88,98	89,05	89,21	
		S.2 Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	S2.1 : Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	13	15	17	19	21	22	

3.2 Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah dan misi yang melibatkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja untuk menjawab permasalahan terkait bidang tenaga kerja Kabupaten Kuantan Singingi serta menjawab tantangan pelayanan tenaga kerja yang semakin kompleks, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Strategi disusun untuk memperkuat kapasitas Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan merata, sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta kebijakan nasional dan daerah

Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 termasuk kedalam visi misi RPJMD ke 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sesuai Potensi Wilayah”**. Adapun Tujuannya yaitu Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Inovatif didukung oleh Iptek dengan Sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi Daerah. Berikut disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang tenaga kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja r a t e g i D a n	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing 2. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Terlatih 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan 3. Meningkatkan Kemitraan dengan Dunia Usaha 4. Meningkatkan Akses Informasi Pasar Kerja yang dapat Diakses Masyarakat 5. Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri 6. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja Formal dan Informal
	2. Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis 2. Menurunkan Kasus Pelanggaran Ketenagakerjaan	1. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Persyaratan Kerja 2. Meningkatkan Sistem Pengupahan yang adil 3. Meningkatkan Penyelesaian Hubungan Industrial 4. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja 5. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

1. **Sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja”**, dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut : Meningkatkan Kesempatan Kerja dalam dan Luar Negeri serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan TKI Purna, Penca dan Lansia, Pembinaan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing, dan Penyelenggaraan Model-Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (BKO, BKK).
2. **Sasaran “Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”**, Meningkatkan **Perlindungan Tenaga Kerja** dapat dilakukan melalui Strategi Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota/Sektoral Provinsi dan Kab/Kota, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja, dan Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Strategi Meningkatkan Keterampilan, Kompetensi, Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan, serta Harmonisasi Regulasi ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara kontinyu dan komprehensif hingga memperoleh sertifikat kompetensi.

Strategi Meningkatkan Kesempatan Kerja Penempatan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri Serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Pemberdayaan TKI Purna, Pasca dan Lansia, dan Penyelenggaraan Model Model

Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (BKO, BKK) ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri difokuskan pada pra dan pasca penempatan, optimalisasi peran lembaga penempatan tenaga kerja, dan memperluas akses informasi pasar kerja.

Strategi Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten.

Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan Dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik di luar Maupun Didalam Hubungan Kerja, dan Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Menjaga dan Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan fokus penetapan sistem pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesahan peraturan perusahaan, peningkatan kepesertaan jaminan sosial.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja											
- Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,24	2,28	2,22	2,15	2,09	2,02	1,96	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,49	66,12	68,45	70,12	71,98	73,22	75,14	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	20,59	25,24	30,32	35,41	40,49	45,57	50,65	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	5,14	5,96	6,17	7,34	9,27	10,44	11,63	
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	10	13	15	17	19	21	22	

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD Dinas Tenaga Kerja

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan ketenagakerjaan	Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan	Pemerataan pelayanan ketenagakerjaan	Penguatan pelayanan ketenagakerjaan	Pemantapan pelayanan ketenagakerjaan

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Tenaga Kerja

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja . Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : - Perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan - pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan - pelaksanaan administrasi dinas - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	Penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui kemitraan lintas sektor, pelatihan kompetensi bersertifikat, dan perlindungan tenaga kerja yang inklusif.	- Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Terlatih - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan - Peningkatan Kemitraan dengan Dunia Usaha - Peningkatan Akses Informasi Pasar Kerja yang dapat Diakses Masyarakat - Peningkatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri - Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja Formal dan Informal - Peningkatan Kualitas Tata kelola Persyaratan Kerja - Peningkatan Sistim Pengupahan yang adil - Peningkatan Penyelesaian Hubungan Industrial - Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja - Peningkatan Kepatuhan Terhadap UU Ketenagakerjaan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Pada bab ini akan diuraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang disertai indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatifnya. Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial.

Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan yang diakomodir dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.814.123.792,00		4.974.247.504,19		5.321.177.198,29		5.726.619.953,70		5.982.037.613,78	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.828.123.792,00		4.015.247.504,19		4.302.177.198,29		4.697.619.953,70		4.913.037.613,78	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	3.828.123.792,00	100	4.015.247.504,19	100	4.302.177.198,29	100	4.697.619.953,70	100	4.913.037.613,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	20	21,30	22,11	150.000.000,00	23,45	50.000.000,00	24,17	50.000.000,00	25,36	50.000.000,00	25,70	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					56.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,83	2,14	2,83	56.000.000,00	3,47	200.000.000,00	3,98	200.000.000,00	4,41	200.000.000,00	4,99	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					65.000.000,00		384.000.000,00		404.000.000,00		404.000.000,00		424.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	87,22	87,83	88,11	65.000.000,00	88,73	384.000.000,00	88,98	404.000.000,00	89,05	404.000.000,00	89,21	424.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					715.000.000,00		325.000.000,00		365.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	10	13	15	715.000.000,00	17	325.000.000,00	19	365.000.000,00	21	375.000.000,00	22	375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
TOTAL KESELURUHAN					4814123792,00		4974247504,19		5321177198,29		5726619953,70		5982037613,78	

4.2 Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

C. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	T:Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja				T1: 1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3. Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
		S1.1Meningkatnya Kesempatan Kerja			S1: Persentase Tingkat Kesempatan Kerja		
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja		2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	
					1. Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 2. Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)		2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten		2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)		2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia		2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
				Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	
				Jumlah Aplikasi Pasar Kerja online		2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan pendidikan pelatihan kerja		2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
		S2 : Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			S2 : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak		
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial	2.07.05 Program Hubungan Industrial	
				Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama		2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	

				Terdaftar di WLKP Online	Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)		
NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
				Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Persentase Jumlah Perusahaan yang berselisih		2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	

				Berakibat/Berdampak pada		Penutupan Perusahaan yang	
NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
				Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	2.07.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah		2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat		2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara		2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel di atas memetakan keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dengan sasaran RPJMD yang relevan, serta bagaimana hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, hingga program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi. Tabel ini menjadi panduan strategis yang memandu Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi dalam merumuskan kebijakan dan rencana kerja secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Secara umum, tabel ini menggambarkan bagaimana Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi diarahkan untuk meningkatkan urusan pemerintah bidang tenaga kerja. Tujuan utama yang tercantum, yaitu Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja (T1), dijabarkan menjadi dua sasaran strategis (S1.1 hingga S2). Setiap sasaran memiliki outcome dan output spesifik yang mendukung tercapainya tujuan, seperti Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing, Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, dan Menurunnya Kasus Pelanggaran Ketenagakerjaan.

Setiap outcome dan output kemudian diterjemahkan menjadi indikator kinerja yang terukur, misalnya Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja, Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya, Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri, dan Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi. Program-program yang disusun pun mencakup Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial.

Melalui narasi ini, terlihat bahwa integrasi antara NSPK, RPJMD, dan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi tidak hanya menjadi dasar perencanaan, tetapi juga menjadi jaminan bagi pelaksanaan urusan pemerintah bidang tenaga kerja yang akuntabel, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

4.3 Rencana program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi

Pada tahap selanjutnya, penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi tahun 2025-2029 tidak hanya memuat arah kebijakan dan sasaran strategis, tetapi juga dilengkapi dengan rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan setiap prioritas strategis. Tabel berikut ini menyajikan rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan secara lebih terperinci, termasuk estimasi pendanaan dalam lima tahun, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi. Penyajian ini diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang lebih konkrit dan operasional, memudahkan proses implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang akuntabel secara berkelanjutan.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.814.123.792,00		4.974.247.504,19		5.321.177.198,29		5.726.619.953,70		5.982.037.613,78		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.828.123.792,00		4.015.247.504,19		4.302.177.198,29		4.697.619.953,70		4.913.037.613,78		
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	3.828.123.792,00	100	4.015.247.504,19	100	4.302.177.198,29	100	4.697.619.953,70	100	4.913.037.613,78	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	47	12.000.000,00	47	12.000.000,00	47	12.000.000,00	47	12.000.000,00	47	12.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00		
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00		
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	47	3.000.000,00	47	3.000.000,00	47	3.000.000,00	47	3.000.000,00	47	3.000.000,00		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.384.673.792,00		3.087.604.104,19		3.261.033.798,29		3.551.976.553,70		3.684.894.213,78		
Persentase Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23	3.384.673.792,00	30	3.087.604.104,19	35	3.261.033.798,29	35	3.551.976.553,70	40	3.684.894.213,78		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.381.673.792,00		3.084.804.104,19		3.258.033.798,29		3.548.976.553,70		3.681.894.213,78			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23	3.381.673.792,00	30	3.084.804.104,19	35	3.258.033.798,29	35	3.548.976.553,70	40	3.681.894.213,78			
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16.500.000,00		39.000.000,00		52.000.000,00		65.000.000,00		78.000.000,00			
Persentase pegawai yang mengikuti diklat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	3	16.500.000,00	6	39.000.000,00	8	52.000.000,00	10	65.000.000,00	12	78.000.000,00			
2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				16.500.000,00		39.000.000,00		52.000.000,00		65.000.000,00		78.000.000,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	3	16.500.000,00	6	39.000.000,00	8	52.000.000,00	10	65.000.000,00	12	78.000.000,00			
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.000.000,00		356.500.000,00		419.000.000,00		505.500.000,00		575.000.000,00			
Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.000	1.000	265.000.000,00	1.000	356.500.000,00	1.000	419.000.000,00	1.000	505.500.000,00	1.000	575.000.000,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	120		120		150		170		180				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	24		24		24		24		24		24		
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		7.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5.000.000,00	12	7.000.000,00	12	13.000.000,00	12	15.000.000,00	12	18.000.000,00			
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		54.000.000,00		72.000.000,00		82.000.000,00		94.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	24	30.000.000,00	24	54.000.000,00	24	72.000.000,00	24	82.000.000,00	24	94.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000,00		40.000.000,00		48.000.000,00		52.000.000,00		56.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	25.000.000,00	12	40.000.000,00	12	48.000.000,00	12	52.000.000,00	12	56.000.000,00		
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.000	1.000	5.000.000,00	1.000	5.500.000,00	1.000	6.000.000,00	1.000	6.500.000,00	1.000	7.000.000,00		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		250.000.000,00		280.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	120	200.000.000,00	120	250.000.000,00	150	280.000.000,00	170	350.000.000,00	180	400.000.000,00		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				77.750.000,00		177.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	6	77.750.000,00	12	177.000.000,00	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1		6		10		10		10			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	4		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00				0,00			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				37.740.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	6	37.740.000,00	12	80.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.07.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.000.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	4	28.000.000,00	10	57.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00		
2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.010.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	12.010.000,00	6	40.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.100.000,00		198.993.400,00		203.993.400,00		208.993.400,00		208.993.400,00		
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	23	0	12.100.000,00	10	198.993.400,00	10	203.993.400,00	10	208.993.400,00	10	208.993.400,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120	300		120		120		120		120			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120	300	3.600.000,00	120	8.800.000,00	120	8.800.000,00	120	8.800.000,00	120	8.800.000,00		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.500.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	8.500.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		135.193.400,00		135.193.400,00		135.193.400,00		135.193.400,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	23	0	0,00	10	135.193.400,00	10	135.193.400,00	10	135.193.400,00	10	135.193.400,00		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.100.000,00		144.150.000,00		144.150.000,00		144.150.000,00		144.150.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	0	60.100.000,00	10	144.150.000,00	10	144.150.000,00	10	144.150.000,00	10	144.150.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	14		16		16		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		2		2		2		2			
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000,00		38.530.000,00		38.530.000,00		38.530.000,00		38.530.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	38.530.000,00	1	38.530.000,00	1	38.530.000,00	1	38.530.000,00		
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		67.120.000,00		67.120.000,00		67.120.000,00		67.120.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	25.000.000,00	2	67.120.000,00	2	67.120.000,00	2	67.120.000,00	2	67.120.000,00		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	0	0,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00		
2.07.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.100.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	14	10.100.000,00	16	16.500.000,00	16	16.500.000,00	16	16.500.000,00	16	16.500.000,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	20	22,11	150.000.000,00	23,45	50.000.000,00	24,17	50.000.000,00	25,36	50.000.000,00	25,70	70.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		
Persentase Tersusunannya Rencana Tenaga Kerja	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	150.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	0	70.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0		0		0		0		1			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		70.000.000,00		
Tersusunannya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	0,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	0	0,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				56.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,83	2,83	56.000.000,00	3,47	200.000.000,00	3,98	200.000.000,00	4,41	200.000.000,00	4,99	200.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				56.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	16	16	56.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00		
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	0		5		5		5		5			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				56.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	16	16	56.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	0	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				65.000.000,00		384.000.000,00		404.000.000,00		404.000.000,00		424.000.000,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	87,22	88,11	65.000.000,00	88,73	384.000.000,00	88,98	404.000.000,00	89,05	404.000.000,00	89,21	424.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000,00		214.000.000,00		214.000.000,00		214.000.000,00		214.000.000,00		
Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	16	16	65.000.000,00	18	214.000.000,00	18	214.000.000,00	18	214.000.000,00	18	214.000.000,00		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	30	30		80		80		80		80			
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	60	45		80		80		80		80			
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				25.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	30	30	25.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				30.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	60	45	30.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0	0	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				10.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	16	16	10.000.000,00	18	24.000.000,00	18	24.000.000,00	18	24.000.000,00	18	24.000.000,00		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Jumlah Aplikasi Pasar Kerja online	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	0	0	0,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	0	0	0,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00	80	70.000.000,00		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		
Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan pendidikan pelatihan kerja	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	0	0,00	20	100.000.000,00	25	120.000.000,00	25	120.000.000,00	35	140.000.000,00		
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	0		20			25		25		25		
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	0	0,00	20	50.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	35	80.000.000,00		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	0	0,00	20	50.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				715.000.000,00		325.000.000,00		365.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	10	15	715.000.000,00	17	325.000.000,00	19	365.000.000,00	21	375.000.000,00	22	375.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	20	1	30.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00		
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	14	0		4		6		8		8			
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	14	14		14		14		14		14			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	14	14	15.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	14	0	0,00	4	30.000.000,00	6	40.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				15.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	20	1	15.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				685.000.000,00		235.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		
Persentase Jumlah Perusahaan yang berselisih	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	20	3.080	685.000.000,00	300	235.000.000,00	400	265.000.000,00	400	265.000.000,00	400	265.000.000,00		
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	15	10		15		15		15		15			
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	20	0		20		20		20		20			
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	15	10		15		15		15		15			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				34.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	15	10	34.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	15	10	10.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	20	0	0,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				0,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	0	0,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				641.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	20	3.080	641.000.000,00	300	65.000.000,00	400	85.000.000,00	400	85.000.000,00	400	85.000.000,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sub Kegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang ke dalam IKU RPJMD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan 1 sasaran yaitu Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator sasaran Tingkat Kesempatan Kerja.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.24	2.28	2.22	2.15	2.09	2.02	1.96	
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.49	66.12	68.45	70.12	71.98	73.22	75.14	
3.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	20.59	25.24	30.32	35.41	40.49	45.57	50.65	

Tabel di atas menyajikan rencana indikator kinerja utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi selama periode tahun 2025 hingga 2030. Indikator-indikator ini dipilih untuk mengukur capaian strategis yang berfokus pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pertama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 sebesar 2,28% diupayakan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2030 sebesar 1,96%. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi dalam mengurangi angka pengangguran

Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2025 sebesar 66,12% dan diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2030 sebesar 75,14%.

Ketiga, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tahun 2025 sebesar 25,24% dan diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2030 sebesar 50,65%. Ini dilaksanakan dengan adanya kerjasama dengan mitra yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan pengusaha untuk melindungi hak pekerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi disusun dengan maksud dan tujuan (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis atau sasaran suatu organisasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) membantu merepresentasikan kinerja organisasi melalui data kuantitatif atau kualitatif, yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian sasaran dan prioritas strategis yang ingin diraih. Karakteristik Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu :

1. Spesifik (harus jelas dan focus pada aspek kinerja tertentu yang ingin diukur).
2. Terukur (dapat diukur secara kuantitatif/angka maupun kualitatif/deskripsi).
3. Dapat dicapai (sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai oleh organisasi).
4. Relevan (selaras dengan tujuan dan sasaran keseluruhan organisasi).
5. Berbatas waktu (memiliki kerangka waktu yang jelas untuk mencapai target yang ditentukan).

Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	positif	%	20	21,30	22,11	23,45	24,17	25,36	25,70	
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	1,83	2,14	2,83	3,47	3,98	4,41	4,99	
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	positif	%	87,22	87,83	88,11	88,73	88,98	89,05	89,21	
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	10	13	15	17	19	21	22	

Tabel tersebut merinci indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi fokus utama Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi dalam periode perencanaan strategis tahun 2025 hingga 2029.

1. Indikator pertama yaitu Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan.
2. Indikator kedua yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja.
3. Indikator ketiga yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.
4. Indikator keempat yaitu Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Lintas Kerja Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
5. Indikator kelima yaitu Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Dengan target-target yang disusun secara progresif dan terukur ini, Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional, RPJMD Kabupaten/Kota, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi yang telah memberikan masukan, data, dan dukungan dalam proses penyusunan Renstra ini.

Ke depannya, kami berharap implementasi Renstra ini dapat berjalan efektif dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sinergi dan kerja sama yang solid dari seluruh elemen sangat dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi, serta untuk memberikan pelayanan yang profesional, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai kelengkapan dokumen ini, lampiran-lampiran yang berisi data pendukung, analisis situasi, dan matriks perencanaan strategis dapat dijadikan rujukan teknis lebih lanjut. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.